

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 24 Februari 2022, Invasi pasukan militer Rusia ke Ukraina menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan terbesar dalam sejarah dunia modern di perbatasan timur Uni Eropa. Sehingga mengharuskan warga negara Ukraina pergi meninggalkan negaranya ke negara lain untuk mencari perlindungan yang aman. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Ukraina telah mendapatkan perhatian internasional karena pada awal invasi jutaan warga Ukraina pergi meninggalkan negaranya sehingga menyebabkan terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar. Warga Ukraina pergi meninggalkan negaranya dengan melakukan perjalanan puluhan jam dengan keadaan kelaparan, kedinginan, dan kelelahan. Kondisi ini menempatkan mereka dalam risiko besar terhadap terjangkitnya penyakit bahkan kematian.¹

Sebagian besar pengungsi Ukraina memilih ke negara Eropa untuk mencari keamanan dikarenakan negara tersebut menyediakan tempat penampungan sementara dengan berbagai layanan dan merasa proses untuk pindah ke negara Eropa lainnya relatif lebih mudah. Polandia merupakan negara di Eropa yang secara geografis berdampingan dengan Ukraina serta adanya hubungan sejarah dan politik yang kuat menjadi salah satu negara yang menerima

¹ Pędziwiatr, K., & Magdziarz, W. (2022). Reception and integration of refugees from Ukraine in Poland, Czechia, Slovakia and Hungary – New immigration destinations in Central Europe. *Problem Polityki Społecznej Studia i Dyskusje*, 59 (4), 345-377.

gelombang besar pengungsi dari Ukraina.² Sebagai anggota Uni Eropa, Polandia terikat oleh berbagai instrumen hukum Uni Eropa yang mengatur perlindungan pengungsi dan pencari suaka. Sehingga selama periode tersebut, Polandia sejak awal memfasilitasi warga Ukraina untuk memasuki negaranya tanpa memerlukan visa dan dokumen tertentu sehingga segera mendapatkan bantuan yang diperlukan. Untuk menunjukkan rasa solidaritas dan nilai-nilai kemanusiaan, Polandia bertanggung jawab untuk membantu Ukraina yang sedang dalam kesulitan dengan menjamin keamanan dan keselamatan para pengungsi Ukraina.³

Isu pengungsi Ukraina mendapat perhatian internasional karena dianggap sebagai salah satu krisis kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern di perbatasan timur Uni Eropa, dan peristiwa tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Perhatian ini semakin diperkuat oleh perubahan sikap Polandia dalam menerima pengungsi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Polandia, yang sebelumnya memiliki tindakan yang lebih restriktif terhadap pengungsi, menunjukkan keterbukaan dan respons yang cepat dalam menangani krisis pengungsi Ukraina.⁴

Pada tahun 2011, sejak awal krisis pengungsi yang diawali dengan eskalasi konflik Arab Spring, Polandia termasuk negara yang menunjukkan sikap relatif tertutup terhadap pengungsi dan tidak sepenuhnya menerima kuota pengungsi yang telah ditetapkan. Berlanjut pada tahun 2015, Uni Eropa

² Firlit-Fesnak, G., Jaroszevska, E., Łotocki, L., Łukaszewska-Bezulska, J., Oldak, M., Zawadzki, P., Żukowski, T. (2022). Inwazja Rosji na Ukrainę: Społeczeństwo i polityka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny. Warszawa: Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Government

³ Domaradzki, J., Walkowiak, D., Bazan, D., & Baum, E. (2022). Volunteering on the front lines of the Ukrainian refugee crisis: A brief report from Poland. *Frontiers in public health*, 10, 979751.

⁴ Gunawan, G. R. (2024). Faktor Pendorong Polandia Mengesahkan *Special Act On Assistance Terhadap Penerimaan Pengungsi Ukraina Tahun 2022*.

mengalami krisis pengungsi dalam jumlah besar akibat konflik di Timur-Tengah yang mengharuskan mengeluarkan kebijakan relokasi untuk mengurangi tekanan yang dialami oleh Yunani dan Italia. Namun Polandia bersama beberapa negara anggota Uni Eropa lainnya menentang kebijakan tersebut karena alasan adanya prioritas keamanan nasional dan ketidaksiapan mereka dalam menerima budaya yang berbeda.⁵

Namun situasi berubah saat terjadinya krisis kemanusiaan yang terjadi di Ukraina pada tahun 2022, dimana sikap Polandia mengalami perubahan dalam menerima pengungsi dari Ukraina. Pemerintah Polandia mengadopsi sikap yang lebih responsif dan mengizinkan pengungsi Ukraina untuk masuk ke negara mereka. Sebagai negara yang berdampingan langsung dengan Ukraina, Polandia tidak hanya mengalami dampak langsung dari konflik tersebut tetapi juga memegang tanggung jawab kemanusiaan yang signifikan terhadap para pengungsi Ukraina.⁶ Berdasarkan data dari Statista, Polandia merupakan negara kedua yang paling banyak menampung pengungsi Ukraina setelah Jerman.⁷ Kemudian diantara tujuh negara tetangga Ukraina, Polandia menjadi negara pertama dengan jumlah paling banyak yang menampung pengungsi Ukraina.⁸ Sehingga penulis dalam penelitian ini akan membahas mengenai upaya Polandia dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Ukraina tahun 2022.

⁵ Potyrała, A. (2016). Poland towards the migration crisis of 2015-2016. 2(16), 75-87. doi:10.14746/pp.2016.21.2.6 President

⁶ ohocr. (2022). UN expert praises generosity towards Ukrainian refugees by Poland and urges Belarus and Poland to end pushbacks. Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/un-expertpraises-generosity-towards-ukrainian-refugees-poland-and-urges>

⁷ Statista. Penyebaran Pengungsi Ukraina di Uni Eropa dari Februari 2022-Maret 2024. Diakses dari <https://www.statista.com/statistics/1312584/ukrainian-refugees-by-country/>

⁸ World Health Organization. Pengungsi Ukraina di Negara Tetangga Tahun 2022. Diakses dari <https://www.who.int/europe/emergencies/situations/ukraine-emergency/situation-reports-global>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana upaya Polandia dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Ukraina tahun 2022?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah jelaskan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui upaya Polandia dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Ukraina tahun 2022.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat dan menambah informasi baru bagi dunia pendidikan, terutama dalam bidang studi Hubungan Internasional. Secara keseluruhan, penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan terkait konsep kebijakan publik dan konsep *refugee humanitarian* yang berkaitan dengan upaya Polandia dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Ukraina tahun 2022.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Selain dapat memberikan manfaat akademis, penulis juga berharap dalam penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman bagi penulis sendiri dalam memahami dan mengerti mengenai upaya Polandia dalam memberikan

perlindungan kepada pengungsi Ukraina tahun 2022. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang tertarik membahas permasalahan serupa dengan fokus atau sudut pandang yang berbeda.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mempunyai beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu tersebut pada dasarnya secara spesifik belum ada yang membahas mengenai upaya Polandia dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Ukraina tahun 2022.

Penelitian terdahulu pertama merupakan jurnal yang ditulis oleh Mateusz Babicki, et all dengan judul “*The Outbreak Of The Russian-Ukrainian War In 2022: The Mental Health Of Polish Citizens and Their Attitudes Towards Refugees*”.⁹ Penelitian ini menjelaskan bahwa Polandia merupakan negara terbanyak yang menampung jumlah pengungsi setelah pecahnya perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari 2022. Lebih dari enam juta warga Ukraina meninggalkan negaranya untuk mencari keamanan di luar perbatasan. Negara tujuan migrasi yang paling dijadikan sebagai tujuan Ukraina adalah Polandia, dimana dalam 30 hari pertama saja sudah ada hampir 2,4 juta warga Ukraina yang berada di Polandia. Mayoritas masyarakat Polandia tidak mau berbicara mengenai penerimaan pengungsi Ukraina, ketika ditanya perbedaan respon kepada krisis pengungsi di Timur-Tengah 2015 dan terjadinya krisis pengungsi di Belarusia tahun 2021. Keputusan pemerintah sangat berbeda dengan yang terjadi pada

⁹ Babicki, M., Kowalski, K., & Mastalerz-Migas, A. (2023). The outbreak of the 2022 Russo-Ukrainian war: mental health of poles and their attitude to refugees. *Frontiers in Public Health*, 11, 1155904.

konflik perang Rusia-Ukraina. Selain itu konflik yang sedang berlangsung diluar perbatasan mengakibatkan terganggunya kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, atau PTSD. Terlebih lagi pada saat itu masih berlangsungnya COVID-19.

Respon masyarakat Polandia terhadap pengungsi Ukraina mayoritas bersikap positif, dimana penelitian ini mengatakan bahwa terdapat 79,2% yang mengatakan harus diberikan akses gratis terhadap pelayanan kesehatan, 85% mendukung akses gratis sekaligus pendidikan untuk para pengungsi. Hampir 60% masyarakat Polandia tidak khawatir mengenai keuangan mereka akibat krisis, dan 40% percaya bahwa hal tersebut akan meningkatkan perekonomian mereka. Bahkan Polandia yang merupakan negara yang sangat kental akan budaya percaya bahwa para pengungsi akan memperkaya budaya mereka. Namun, sebagian besar masyarakat Polandia takut terhadap penyakit menular, sehingga menurut mereka kesehatan harus diutamakan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Polandia telah menunjukkan sikap empati dan kemanusiaan dalam menghadapi krisis ini.

Penelitian terdahulu kedua merupakan jurnal yang ditulis oleh Stephen McCloskey dengan judul *“The War in Ukraine Has Revealed The Hierarchy of Victims”*.¹⁰ Penelitian ini menjelaskan bahwa Invasi ke Ukraina merupakan tindakan agresi ilegal yang melanggar Piagam PBB dan menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil. Hal tersebut merupakan krisis yang paling parah di Eropa. Meskipun demikian, negara tetangga Eropa telah menanggapi krisis tersebut dengan murah hati dan membiarkan membuka perbatasan mereka. Namun

¹⁰ MCCLOSKEY, S. (2022). The War In Ukraine Has Revealed A Hierarchy Of Victims. *Policy & Practice: A Development Education Review*, (34).

diantara negara Eropa, ada beberapa yang dianggap oleh media barat sebagai kerangka stereotip dan rasis, salah satunya adalah Polandia. Menganggap bahwa Polandia sangat hierarki terhadap korbannya yang membuka perbatasan untuk pengungsi Ukraina, namun menutup perbatasannya untuk pengungsi yang melarikan diri dari perang di negara-negara Selatan. Mereka mengkontraskan kulit putih Eropa dengan kulit coklat atau hitam dari negara Timur-Tengah atau Afrika.

Solidaritas, kemanusiaan dan perlindungan yang diberikan oleh masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, komunitas kepada Ukraina disambut baik oleh seluruh Eropa. Perlakuan mereka berbeda, hal tersebut tercermin dalam cara memperlakukan pengungsi Ukraina yang dibantu oleh negara Eropa, sedangkan pengungsi dari negara Selatan berjuang untuk mendapatkan dukungan dan izin masuk. Berbeda yang dinyatakan oleh PBB bahwa hak asasi manusia harus melekat pada semua manusia tanpa harus melihat ras, jenis, kebangsaan. Seharusnya peraturan ini diterapkan dengan rasa hormat.

Penelitian terdahulu ketiga merupakan jurnal yang ditulis oleh Mateusz Jankowski et all dengan judul ***“One Year Ago: Poland's Public Health Initiative and the National Response to Millions of Refugees from Ukraine”***.¹¹ Penelitian ini menjelaskan bahwa Antara 24 Februari 2022 hingga 24 Februari 2023 akibat invasi militer Rusia ke Ukraina menyebabkan 10,056 juta pengungsi dari Ukraina harus melintasi perbatasan Polandia-Ukraina dan kebanyakan mereka adalah perempuan dan anak-anak yang hampir 90%. Sekitar 2 juta pengungsi dari

¹¹ Jankowski, M., Lazarus, J. V., Kuchyn, I., Zemskov, S., Gałazkowski, R., & Gujski, M. (2023). One year on: Poland's public health initiatives and national response to millions of refugees from Ukraine. *Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research*, 29, e940223-1.

Ukraina telah mendapatkan perlindungan di rumah-rumah pribadi masyarakat Polandia. Selain itu, 900.000 pengungsi dari Ukraina harus mencari pekerjaan, terutama di sektor jasa. Hal tersebut mengharuskan pemerintah Polandia untuk menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan seperti pengawasan dan pencegahan terhadap penyakit menular dan sistem pendukung kesehatan mental termasuk sanitasi dan pencegahan seperti vaksinasi juga menyediakan pengobatan yang memadai. Pemerintah juga harus berinisiatif untuk menyediakan penerjemah bahasa untuk memudahkan berkomunikasi dan memastikan bahwa tidak adanya hambatan dalam hal kesehatan masyarakat. Dampak signifikan para pengungsi adalah gangguan pasca-trauma, gangguan tidur, kecemasan, dan psikologis. Sistem pelayanan kesehatan di Polandia merupakan salah satu bagian yang mungkin lemah dikarenakan kurangnya jumlah spesialis terlatih terutama di bagian psikiater anak.

Penelitian terdahulu keempat merupakan jurnal yang ditulis oleh Krzysztof Zdziarski et al dengan judul ***“Poles' opinion on the need to provide humanitarian assistance Assistance to Refugees from the Area Covered by Russo–Ukrainian War”***.¹² Penelitian ini menjelaskan bahwa banyak negara telah terlibat dalam membantu orang-orang yang mengalami serangan brutal terhadap konflik bersenjata di Ukraina, terutama ibu dan anak. Polandia aktif memberikan bantuannya yang merupakan tanda nyata solidaritas kemanusiaan terhadap para pengungsi Ukraina yang sedang menderita. Keterbukaan hati, rumah dan institusi

¹² Karakiewicz-Krawczyk, K., Zdziarski, K., Landowski, M., Nieradko-Helusko, A., Kotwas, A., Szumilas, P., ... & Karakiewicz, B. (2022). The Opinions of Poles about the Need to Provide Humanitarian Aid to Refugees from the Area Covered by the Russian–Ukrainian War. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(20), 13369.

serta bantuan kemanusiaan dan medis adalah elemen kebaikan dan empati Polandia. Yang paling bersedia membantu, rata-rata orang dengan usia diatas 49 tahun dalam kondisi keuangan yang sangat baik. Menurut masyarakat Polandia, bantuan dari parlemen Eropa tidaklah cukup, sehingga masyarakat ikut membantu dan bersedia memberikan dukungannya. Usia hingga 30 tahun rata-rata mendukung dengan bantuan medis, namun dukungan militer lebih banyak pada usia yang lebih tua. Namun dapat dilihat bahwa masyarakat Polandia memiliki keyakinan internal ingin membantu, dan bahwa bantuan ini berasal dari solidaritas kemanusiaan, percaya bahwa bantuan umum dari negara lain dan parlemen Eropa tidaklah cukup. Dalam beberapa minggu terakhir sikap masyarakat Polandia terhadap Ukraina bersifat netral atau positif, dan membaik atau tetap tidak berubah.

Penelitian terdahulu kelima merupakan jurnal yang ditulis oleh Krzysztof Korzeniewski dengan judul ***“Ukrainian War Refugees And Migrants In Poland: Implications For Public Health”***.¹³ Penelitian ini menjelaskan bahwa pada 24 Februari 2022 dimulainya agresi bersenjata Federasi Rusia terhadap Ukraina mengakibatkan masuknya pengungsi dari Ukraina secara besar-besaran. Warga negara Ukraina melintasi perbatasan internasional untuk melarikan diri dari perang dan mengajukan permohonan suaka baik di Polandia atau di negara-negara UE lainnya. Masuknya para pengungsi menyebabkan situasi epidemiologi yang terburuk di Eropa. Ukraina merupakan negara satu-satunya di Eropa yang melaporkan bahwa terdapat kasus polio akibat dari vaksin. Bukan hanya itu, tetapi

¹³ Korzeniewski, K., Shkilna, M., Huk, M., Shevchuk, O., & Marchelek-Myśliwiec, M. (2024). Ukrainian war refugees and migrants in Poland: implications for public health. *Journal of Travel Medicine*, 31(1), taad119.

juga ada campak, infeksi HIV baru yang tertinggi, prevalensi tuberculosis, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung iskemik, dan diabetes. Sebelum perang, sebagian masyarakat Ukraina pernah mengalami gangguan mental selama hidup mereka. Polandia memberikan pelayanan kesehatan khusus untuk surveilans tuberculosis dan HIV/AIDS dikalangan masyarakat Pengungsi Ukraina. Sebagian besar pengungsi Ukraina yang datang ke Polandia merupakan populasi dari kalangan menengah yang mencari perlindungan dari perang dan dampak negatifnya.

Penelitian terdahulu keenam merupakan jurnal yang ditulis oleh Elybieta Wiycek dengan judul *“Poland Refugee Policy And Poland Society Between Survival Value And Self-Expression”*.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan bahwa pusat penelitian Polandia mengatakan terdapat dua pertiga warganya yang menolak penerimaan pengungsi asal Timur-Tengah, dimana ribuan pengunjung rasa dan kontra-pengunjung berkumpul di jalan. Salah satu alasan anti-migran tersebut dikarenakan terdapatnya homogenitas etnis dan agama di Polandia. Berbeda seperti yang terjadi sebelum PD II yang terkenal dengan toleransi beragama dan menjadi tempat berlindung bagi para pengungsi yang melarikan diri dari penganiayaan. Namun berkembangnya waktu, saat Polandia mengharuskan untuk mengikuti skema kuota Uni Eropa berubah menjadi menolak tegas datangnya para pengungsi. Pergantian pemerintah pada tahun 2015 di Polandia merubah kebijakan pemerintahannya yang awalnya pro-UE dipimpin oleh Ewa Kopacz menjadi kontra-UE dipimpin oleh Beata Szydlo.

¹⁴ Wiącek, E. (2017). Kebijakan pengungsi Polandia dan masyarakat Polandia antara nilai-nilai kelangsungan hidup dan ekspresi diri. *Hubungan Antar Budaya* , 1 (2 (2)), 165-188.

Kebijakan baru pemerintah Polandia tidak lain dipengaruhi adanya euroskeptis yang berfokus pada politik dan kepentingan dalam negeri. Sehingga adanya masyarakat yang pro-pengungsi dan menolak pengungsi menimbulkan konflik nilai-nilai dalam bangsa Polandia. Nilai tersebut terbagi menjadi dua yaitu nilai-nilai kelangsungan hidup versus ekspresi diri dan nilai-nilai rasional tradisional versus nilai-nilai rasional sekuler. Nilai-nilai kelangsungan hidup berkaitan dengan keamanan fisik dan ekonomi yang melibatkan kebebasan dan ketidakpercayaan dengan pihak luar, dan nilai ekspresi diri berkaitan dengan kepercayaan antarpribadi, dan kualitas hidup. Sedangkan nilai-nilai rasional tradisional berkaitan dengan agama, kebanggaan nasional, dan nilai-nilai keluarga tradisional, dan nilai-nilai rasional-sekuler berlawanan dengan nilai tradisional.

Penelitian terdahulu ketujuh merupakan jurnal yang ditulis oleh Kasia Narkowicz dengan judul ***“Refugees Are Not Welcome Here’: State, Church and Civil Society’s Response to the Refugee Crisis in Poland”***.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan bahwa respon Polandia terhadap gelombang pengungsi disebut respon yang tidak disambut baik di Eropa dengan melarang untuk melewati perbatasannya. Respon tersebut ditegur oleh Uni Eropa karena tidak ada solidaritas dengan negara yang menerima para pengungsi. Pemerintah Polandia menganggap bahwa akan menerima para pengungsi dengan syarat mereka bukan Muslim yang akan menimbulkan resiko keamanan. Secara ideologis Polandia mengikuti jejak Orban di Hungaria, dimana pemerintahan sayap kanan Eurosceptic yang mempromosikan nilai-nilai patriotik Katolik dalam kampanye

¹⁵ Narkowicz, K. (2018). 'Refugees are not welcome here': The response of the state, church and civil society to the refugee crisis in Poland. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 31, 357-373.

politik tahun 2015. Mereka menggambarkan UE sebagai negara hegemon yang dengan tegas berusaha mendorong pengungsi melewati perbatasan Polandia dan pengungsi Muslim sebagai penjajah yang bertekad memusnahkan peradaban Eropa (Kristen) Polandia.

Dalam respon gereja terpecah menjadi dua gerakan, pertama gerakan progresif 'Katolik Terbuka' yang lebih kecil dan sayap tradisional yang jauh lebih besar. Kelompok pertama terdiri dari minoritas dalam agama Katolik Polandia, namun mereka memiliki warisan yang panjang dan dihormati dalam politik Polandia. Kedua 'Katolik Tertutup', adalah gerakan Katolik sayap kanan tradisional reaksioner yang jauh lebih besar dan lebih berpengaruh yang memiliki lebih banyak kesamaan dengan pemerintah saat ini. Gereja yang pro terhadap pengungsi, hanya beberapa bulan setelah pemerintah Polandia memutuskan untuk menutup perbatasannya, Paus berbicara tentang penerimaan pengungsi. Sedangkan gereja anti-pengungsi mengatakan sikap dan tindakan Paus Fransiskus yang pro-pengungsi sebagai tindakan yang 'salah', menunjukkan 'tanda-tanda kepatuhan' dan berpotensi berdampak pada keamanan umat manusia. negara. Dalam retorika resmi negara, pejabat pemerintah Polandia secara khusus menargetkan umat Islam dan menghubungkan mereka dengan terorisme. Dan respon masyarakat sipil melakukan demonstrasi dengan jumlah besar yang menentang dan mendukung pemerintah, serta menentang dan mendukung pengungsi, membuktikan tingginya aktivisme yang terjadi di Polandia, baik dalam bidang politik maupun politik.

Penelitian terdahulu kedelapan merupakan jurnal yang ditulis oleh Anandita, Fadia, Dasa, dan Rahmatul dengan judul **“Diferensiasi Kebijakan Polandia dalam Menghadapi Migran Ekonomi dan Pengungsi”**.¹⁶ Penelitian ini menjelaskan bahwa negara-negara di Uni Eropa sedang berfokus pada masalah imigran, dengan upaya membagi tanggung jawab penerimaan pengungsi dan imigran secara adil di antara semua negara anggota, termasuk Polandia. Namun, pemerintah Polandia berpendapat bahwa Uni Eropa dan badan eksekutifnya tidak memiliki wewenang untuk memaksa negara-negara anggota yang berdaulat menerima pengungsi di wilayah mereka. Polandia menekankan bahwa keputusan mengenai penerimaan pengungsi seharusnya merupakan hak masing-masing negara, bukan keputusan yang diambil oleh Uni Eropa. Meskipun menolak kedatangan pengungsi, pemerintah Polandia menegaskan berulang kali bahwa negara tersebut terus memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan dengan memperbesar bantuan kemanusiaan bagi korban perang di Suriah dan bekerja sama dengan organisasi yang menyediakan bantuan, termasuk pembangunan rumah sakit. Selain itu, alasan lain Polandia menolak relokasi pengungsi adalah karena negara ini telah menerima sekitar satu juta pengungsi dari Ukraina.

Pada tahun 2015, hampir 1,3 juta warga Ukraina telah mendaftar untuk izin kerja sementara di Polandia, sementara 116.000 lainnya mendapatkan izin kerja jangka panjang. Angka ini meningkat enam kali lipat sejak 2013, akibat adanya kemerosotan ekonomi setelah revolusi pro-Barat di Ukraina pada 2014

¹⁶ Anandita, R., Safitri, F. A., Safitri, D., & NA, R. A. (2018). Diferensiasi Kebijakan Polandia dalam Menghadapi Migran Ekonomi dan Pengungsi. *Jurnal Hubungan Internasional* □ Tahun XI, (2), 190.

dan konflik dengan Rusia di bagian timur negara tersebut. Banyak negara menolak menerima pengungsi, namun Polandia menunjukkan sikap positif terhadap pengungsi dari Ukraina. Kedatangan pengungsi Ukraina ini disebabkan oleh konflik bersenjata di wilayah mereka. Polandia cenderung menerima mereka karena adanya ikatan sejarah dan geografis, serta persepsi ancaman yang lebih rendah. Sikap positif ini menurun drastis ketika menyangkut pengungsi dari Timur Tengah.

Dalam kasus pengungsi dari wilayah tersebut, identitas agama mereka, khususnya identitas Muslim, berperan dalam penolakan yang ditunjukkan oleh masyarakat Polandia. Identitas Muslim dari pengungsi Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Polandia, yang mayoritasnya menganut agama Katolik. Kekhawatiran ini berakar pada potensi perubahan terhadap identitas budaya dan agama masyarakat Polandia, seperti nilai-nilai budaya dan agama yang mereka anggap penting. Identitas agama menjadi faktor signifikan dalam penolakan terhadap pengungsi dari Timur Tengah. Adanya perbedaan agama ini menciptakan ketidaknyamanan dan ketakutan akan perubahan sosial dan budaya yang dianggap bisa mengancam stabilitas dan integritas identitas nasional Polandia.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No.	Judul Penelitian	Teori /Konsep dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>The Outbreak Of The Russian-Ukrainian War In 2022: The Mental</i>	Jenis Penelitian : Kuantitatif	Respon masyarakat Polandia terhadap pengungsi Ukraina mayoritas bersikap positif, dimana penelitian ini

	<p><i>Health Of Polish Citizens and Their Attitudes Towards Refugees</i></p> <p>Oleh : Babicki, et all</p>		<p>mengatakan bahwa terdapat 79,2% yang mengatakan harus diberikan akses gratis terhadap pelayanan kesehatan, 85% mendukung akses gratis sekaligus pendidikan untuk para pengungsi. Hampir 60% masyarakat Polandia tidak khawatir mengenai keuangan mereka akibat krisis, dan 40% percaya bahwa hal tersebut akan meningkatkan perekonomian mereka. Bahkan Polandia yang merupakan negara yang sangat kental akan budaya percaya bahwa para pengungsi akan memperkaya budaya mereka. Namun, sebagian besar masyarakat Polandia takut terhadap penyakit menular, sehingga menurut mereka kesehatan harus diutamakan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Polandia telah menunjukkan sikap empati dan kemanusiaan dalam menghadapi krisis ini.</p>
2.	<p><i>The War in Ukraine Has Revealed The Hierarchy of Victims</i></p> <p>Oleh : Stephen McCloskey</p>	<p>Jenis Penelitian : Kualitatif deskriptif</p>	<p>Solidaritas, kemanusiaan dan perlindungan yang diberikan oleh masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, komunitas kepada Ukraina disambut baik oleh seluruh Eropa. Perlakuan mereka berbeda, hal tersebut tercermin dalam cara memperlakukan pengungsi Ukraina yang dibantu oleh negara Eropa, sedangkan pengungsi dari negara Selatan berjuang untuk mendapatkan dukungan dan izin masuk. Berbeda yang dinyatakan oleh PBB bahwa hak asasi manusia harus</p>

			melekat pada semua manusia tanpa harus melihat ras, jenis, kebangsaan. Seharusnya peraturan ini diterapkan dengan rasa hormat.
3.	<p><i>One Year Ago: Poland's Public Health Initiative and the National Response to Millions of Refugees from Ukraine</i></p> <p>Oleh : Mateusz Jankowski et all</p>	Jenis Penelitian : Kualitatif deskriptif	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwa Antara 24 Februari 2022 hingga 24 Februari 2023 akibat invasi militer Rusia ke Ukraina menyebabkan 10,056 juta pengungsi dari Ukraina harus melintasi perbatasan Polandia-Ukraina dan kebanyakan mereka adalah perempuan dan anak-anak yang hampir 90%. Sekitar 2 juta pengungsi dari Ukraina telah mendapatkan perlindungan di rumah-rumah pribadi masyarakat Polandia. Selain itu, 900.000 pengungsi dari Ukraina harus mencari pekerjaan, terutama di sektor jasa. Hal tersebut mengharuskan pemerintah Polandia untuk menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan seperti pengawasan dan pencegahan terhadap penyakit menular dan sistem pendukung kesehatan mental termasuk sanitasi dan pencegahan seperti vaksinasi juga menyediakan pengobatan yang memadai. Pemerintah juga harus berinisiatif untuk menyediakan penerjemah bahasa untuk memudahkan berkomunikasi dan memastikan bahwa tidak adanya hambatan dalam hal kesehatan masyarakat. Dampak signifikan para pengungsi adalah gangguan pasca-trauma, gangguan tidur, kecemasan, dan psikologis. Sistem pelayanan kesehatan di</p>

			Polandia merupakan salah satu bagian yang mungkin lemah dikarenakan kurangnya jumlah spesialis terlatih terutama di bagian psikiater anak.
4.	<p><i>Poles' opinion on the need to provide humanitarian assistance to Refugees from the Area Covered by Russo-Ukrainian War</i></p> <p>Oleh : Krzysztof Zdziarski et all</p>	Jenis Penelitian : Kuantitatif	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwa banyak negara telah terlibat dalam membantu orang-orang yang mengalami serangan brutal terhadap konflik bersenjata di Ukraina, terutama ibu dan anak. Polandia aktif memberikan bantuannya yang merupakan tanda nyata solidaritas kemanusiaan terhadap para pengungsi Ukraina yang sedang menderita. Keterbukaan hati, rumah dan institusi serta bantuan kemanusiaan dan medis adalah elemen kebaikan dan empati Polandia. Yang paling bersedia membantu, rata-rata orang dengan usia diatas 49 tahun dalam kondisi keuangan yang sangat baik. Menurut masyarakat Polandia, bantuan dari parlemen Eropa tidaklah cukup, sehingga masyarakat ikut membantu dan bersedia memberikan dukungannya. Usia hingga 30 tahun rata-rata mendukung dengan bantuan medis, namun dukungan militer lebih banyak pada usia yang lebih tua. Namun dapat dilihat bahwa masyarakat Polandia memiliki keyakinan internal ingin membantu, dan bahwa bantuan ini berasal dari solidaritas kemanusiaan, percaya bahwa bantuan umum dari negara lain dan parlemen Eropa tidaklah cukup. Dalam beberapa minggu</p>

			terakhir sikap masyarakat Polandia terhadap Ukraina bersifat netral atau positif, dan membaik atau tetap tidak berubah.
5.	<p><i>Ukrainian War Refugees And Migrants In Poland: Implications For Public Health</i></p> <p>Oleh : Krzysztof Korzeniewski, et all.</p>	Jenis Penelitian : Kuantitatif	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwa pada 24 Februari 2022 dimulainya agresi bersenjata Federasi Rusia terhadap Ukraina mengakibatkan masuknya pengungsi dari Ukraina secara besar-besaran. Warga negara Ukraina melintasi perbatasan internasional untuk melarikan diri dari perang dan mengajukan permohonan suaka baik di Polandia atau di negara-negara UE lainnya. Masuknya para pengungsi menyebabkan situasi epidemiologi yang terburuk di Eropa. Ukraina merupakan negara satu-satunya di Eropa yang melaporkan bahwa terdapat kasus polio akibat dari vaksin. Bukan hanya itu, tetapi juga ada campak, infeksi HIV baru yang tertinggi, prevalensi tuberculosis, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung iskemik, dan diabetes. Sebelum perang, sebagian masyarakat Ukraina pernah mengalami gangguan mental selama hidup mereka. Polandia memberikan pelayanan kesehatan khusus untuk surveilans tuberculosis dan HIV/AIDS dikalangan masyarakat Pengungsi Ukraina. Sebagian besar pengungsi Ukraina yang datang ke Polandia merupakan populasi dari kalangan menengah yang</p>

			mencari perlindungan dari perang dan dampak negatifnya.
6.	<p><i>Poland Refugee Policy And Poland Society Between Survival Value And Self-Expression</i></p> <p>Oleh : Elybieta Wiycek</p>	Jenis Penelitian : Kualitatif deskriptif	<p>Kebijakan baru pemerintah Polandia tidak lain dipengaruhi adanya euroskeptis yang berfokus pada politik dan kepentingan dalam negeri. Sehingga adanya masyarakat yang pro-pengungsi dan menolak pengungsi menimbulkan konflik nilai-nilai dalam bangsa Polandia. Nilai tersebut terbagi menjadi dua yaitu nilai-nilai kelangsungan hidup versus ekspresi diri dan nilai-nilai rasional tradisional versus nilai-nilai rasional sekuler. Nilai-nilai kelangsungan hidup berkaitan dengan keamanan fisik dan ekonomi yang melibatkan kebebasan dan ketidakpercayaan dengan pihak luar, dan nilai ekspresi diri berkaitan dengan kepercayaan antarpribadi, dan kualitas hidup. Sedangkan nilai-nilai rasional tradisional berkaitan dengan agama, kebanggaan nasional, dan nilai-nilai keluarga tradisional, dan nilai-nilai rasional-sekuler berlawanan dengan nilai tradisional.</p>
7.	<p><i>Refugees Are Not Welcome Here': State, Church and Civil Society's Response to the Refugee Crisis in Poland</i></p> <p>Oleh : Kasia Narkowicz</p>	Jenis Penelitian : Kualitatif deskriptif	<p>Dalam respon gereja terpecah menjadi dua gerakan, pertama gerakan progresif 'Katolik Terbuka' yang lebih kecil dan sayap tradisional yang jauh lebih besar. Kelompok pertama terdiri dari minoritas dalam agama Katolik Polandia, namun mereka memiliki warisan yang panjang dan</p>

			<p>dihormati dalam politik Polandia. Kedua 'Katolik Tertutup', adalah gerakan Katolik sayap kanan tradisional reaksioner yang jauh lebih besar dan lebih berpengaruh yang memiliki lebih banyak kesamaan dengan pemerintah saat ini. Gereja yang pro terhadap pengungsi, hanya beberapa bulan setelah pemerintah Polandia memutuskan untuk menutup perbatasannya, Paus berbicara tentang penerimaan pengungsi. Sedangkan gereja anti-pengungsi mengatakan sikap dan tindakan Paus Fransiskus yang pro-pengungsi sebagai tindakan yang 'salah', menunjukkan 'tanda-tanda kepatuhan' dan berpotensi berdampak pada keamanan umat manusia. negara. Dalam retorika resmi negara, pejabat pemerintah Polandia secara khusus menargetkan umat Islam dan menghubungkan mereka dengan terorisme. Dan respon masyarakat sipil melakukan demonstrasi dengan jumlah besar yang menentang dan mendukung pemerintah, serta menentang dan mendukung pengungsi, membuktikan tingginya aktivisme yang terjadi di Polandia, baik dalam bidang politik maupun politik.</p>
8.	<p>Diferensiasi Kebijakan Polandia dalam Menghadapi Migran Ekonomi dan Pengungsi</p>	<p>Jenis Penelitian : Kualitatif deskriptif</p>	<p>Meskipun menolak kedatangan pengungsi, pemerintah Polandia menegaskan berulang kali bahwa negara tersebut terus memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan dengan</p>

	<p>Oleh : Anindita, et all.</p>	<p>memperbesar bantuan kemanusiaan bagi korban perang di Suriah dan bekerja sama dengan organisasi yang menyediakan bantuan, termasuk pembangunan rumah sakit. Dalam kasus pengungsi dari wilayah tersebut, identitas agama mereka, khususnya identitas Muslim, berperan dalam penolakan yang ditunjukkan oleh masyarakat Polandia. Identitas Muslim dari pengungsi Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Polandia, yang mayoritasnya menganut agama Katolik. Kekhawatiran ini berakar pada potensi perubahan terhadap identitas budaya dan agama masyarakat Polandia, seperti nilai-nilai budaya dan agama yang mereka anggap penting. Identitas agama menjadi faktor signifikan dalam penolakan terhadap pengungsi dari Timur Tengah. Adanya perbedaan agama ini menciptakan ketidaknyamanan dan ketakutan akan perubahan sosial dan budaya yang dianggap bisa mengancam stabilitas dan integritas identitas nasional Polandia.</p>
--	---------------------------------	---

1.5 Landasan Konseptual

1.5.1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pemerintah berawal dari pengamatan terhadap kondisi atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tindakan pemerintah tidak muncul secara tiba-tiba di luar konteks masyarakat. Sebaliknya, kejadian-kejadian ini tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, terkait erat dengan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya.¹⁷ Menurut Carl Friedrich pada tahun 1969, yang dikutip oleh Leo Agustino pada tahun 2006 mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungan ini biasanya memiliki hambatan dan kemungkinan yang harus dihadapi. Kebijakan tersebut diusulkan agar dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ini dan memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan yang ada, dengan tujuan mencapai hasil atau tujuan tertentu yang telah ditetapkan.¹⁸

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan tujuan tertentu dalam kepentingan semua lapisan masyarakat. Kebijakan ini dirancang dengan tujuan spesifik untuk mencapai hasil yang diinginkan dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.¹⁹ Didalam kebijakan publik terdapat aspek penting dari

¹⁷ Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori & Analisis Kebijakan Publik.

¹⁸ Rahmi, N. S., & Subadi, W. (2021). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Tinjau Dari Aspek Komunikasi DI Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 4(1), 101-116.

¹⁹ Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. (Jakarta: Bina Aksara. 2003), hlm. 13. 8

tata kelola pemerintah, yang meliputi peraturan, hukum, dan pedoman yang diarahkan untuk menjaga ketertiban dan mengatasi masalah sosial. Dalam proses pembuatan kebijakan publik, pemerintah memiliki tanggung jawab karena mereka memiliki otoritas dan kewenangan untuk membuat keputusan dan tindakan yang diperlukan untuk menangani masalah-masalah publik tersebut.²⁰ Dengan kata lain, kebijakan publik adalah sarana atau mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan dan mengelola isu-isu yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat luas.

Kebijakan publik mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh suatu masyarakat. Isu-isu ini dapat berupa permasalahan yang berdampak luas dan kompleks, seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, keamanan, sosial, hukum, dan lingkungan. Kebijakan publik dihasilkan melalui proses formal dalam sistem hukum dan pemerintahan, seperti pembentukan undang-undang, peraturan, dan regulasi. Kebijakan tersebut harus mencerminkan dan memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepentingan masyarakat. Kebijakan yang dibuat harus berdasar pada apa yang penting dan bermanfaat bagi kesejahteraan publik. Dengan demikian kebijakan publik melibatkan pemilihan pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat.²¹ Kebijakan publik melibatkan beberapa tahapan penting yaitu, indentifikasi masalah yang memerlukan perhatian pemerintah, mencari dan merancang untuk memecahkan masalah tersebut, proses pengambilan keputusan,

²⁰ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 21.

²¹ Andyani, F. D. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik (Studi Pada Kartu Sehat Bekasi Tahun 2017 Dan 2018)* (Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta).

setelah keputusan sudah ditentukan lalu diimplementasikan, kemudian evaluasi dari kebijakan yang telah diterapkan.²²

Hubungan kebijakan publik dengan upaya Polandia dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Ukraina pada tahun 2022 dapat dijelaskan melalui tahapan-tahapan tersebut. Pada tahun 2022, terjadi eskalasi konflik di Ukraina yang menyebabkan banyak warga Ukraina mencari perlindungan di negara-negara tetangga, sehingga pemerintah Polandia mengidentifikasi masalah ini sebagai krisis kemanusiaan yang memerlukan respon cepat dan efektif. Setelah masalah diidentifikasi, pemerintah Polandia merumuskan kebijakan untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi. Kemudian pemerintah Polandia mengadopsi kebijakan yang diperlukan seperti pengesahan undang-undang darurat. Setelah disahkannya undang-undang tersebut, pemerintah Polandia mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagai tindakan konkret untuk membantu para pengungsi. Sebagai tahap terakhir yaitu evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan.

1.5.2 Refugee Humanitarian

Salah satu bentuk dalam memahami mengenai hak asasi manusia adalah memberikan perlindungan kepada para pengungsi yang umumnya setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk diperlakukan dengan sama. Hak asasi manusia merupakan salah satu bagian dari hukum internasional yang dapat dikatakan bahwa tidak bisa dipisahkan apabila berbicara mengenai masalah

²² Wahyuni, W. (2022). Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik. HukumOnline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tahapan-pembuatan-kebijakan-publik-lt63452ddb789b0/>

pengungsi.²³ Menurut Haryomataram, terdapat dua macam pengungsi yaitu *Human Rights Refugees* (terpaksa pergi dari negaranya dikarenakan takut dianiaya oleh masalah agama, bangsa, ras, atau politik) dan *Humanitarian Refugees* (terpaksa meninggalkan negaranya dikarenakan merasa tidak aman akibat konflik bersenjata yang ada di dalam negaranya). Mengacu pada orang-orang yang terpaksa meninggalkan negaranya, kata “*humanitarian*” menekankan upaya untuk menyediakan bantuan, perlindungan, dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Artinya hal tersebut mencakup bantuan medis, tempat tinggal, makanan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk memastikan kesejahteraan untuk para pengungsi.²⁴

Dalam memahami konsep pengungsi, biasanya pengungsi tidak dibekali oleh dokumen perjalanan yang lengkap akibat meninggalkan negaranya secara terpaksa sehingga diperlakukan sewenang-wenang oleh negara transit ataupun negara tujuan. Hal tersebut dibutuhkan suatu perlindungan internasional terhadap pengungsi untuk meminimalkan ancaman kekerasan. Seseorang pengungsi akan dianggap sebagai pencari suaka apabila belum diakui statusnya sebagai pengungsi. Apabila telah diakui sebagai pengungsi, maka hak dan kewajiban sebagai pengungsi akan melekat pada dirinya dari negara pelindungnya.²⁵

Di Uni Eropa, pengungsi didefinisikan sebagai orang yang mempunyai ketakutan yang beralasan akan penganiayaan di negara asalnya karena alasan ras, agama, kebangsaan, opini politik, atau keanggotaan dalam kelompok sosial

²³ Amidjojo, S. B., Watni, S., Suradji (SH), & Sutriya. (2006). Perlindungan hukum terhadap pengungsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

²⁴ Haryomataram. Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), Hal. 85.

²⁵ Ibid.

tertentu, dan statusnya diakui oleh negara tuan rumah.²⁶ Undang-undang pengungsi dan hukum internasional tentang hak asasi manusia saling berhubungan erat, karena para pengungsi melarikan diri dari pemerintah yang tidak mampu atau tidak mau melindungi hak asasi manusia yang mendasar.²⁷ Penting untuk membedakan antara konsep “pengungsi” dan “migran”. Seorang migran dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memutuskan untuk pindah ke negara lain untuk mencari pekerjaan, mengejar ambisi pendidikan, bergabung dengan keluarganya, atau karena alasan pribadi lainnya dan bukan karena risiko langsung kehilangan nyawa atau kebebasan. Berbeda dengan pengungsi, para migran tidak takut dianiaya atau dirugikan secara serius di negara asal mereka. Para migran masih menikmati perlindungan dari pemerintah negara asal mereka bahkan di luar negeri, sehingga mereka dapat kembali ke negara mereka sebelumnya.²⁸

Berdasarkan Petunjuk UE 2001/55 /WE, yang menetapkan aturan untuk memberikan perlindungan sementara jika terjadi gelombang besar pengungsi dan langkah-langkah yang mendukung keseimbangan upaya antar negara-negara UE pada tahun 2022. UE memperkenalkan perlindungan sementara bagi orang-orang yang melarikan diri dari perang di Ukraina. Atas dasar ini, orang-orang yang telah menjadi penduduk tetap di Ukraina dan meninggalkan negara tersebut pada atau setelah tanggal 24 Februari 2022 untuk menghindari perang mungkin berhak atas perlindungan sementara setidaknya selama satu tahun di negara UE mana pun

²⁶ Parlemen Europejski. Azyl. (2017). “Azyl i migracja w UE: fakty i liczby” Diakses di <https://www.europarl.europa.eu/topics/pl/article/20170629STO78630/azyl-i-migracja-w-ue-fakty-i-liczby>

²⁷ International Justice Resource Center. Asylum & Refugee Rights International Justice Resource Center. 2012. Diakses dari <https://ijrcenter.org/refugee-law/>

²⁸ . Andrade, M.; Sato, L.; Hammad, M. Improving Social Protection for Migrants, Refugees and Asylum Seekers in Egypt: A Review of International Practices; Research reports; International Policy Center for Inclusive Growth (IPC-IG): Brasilia, Brazil, 2021.

antara implementasi program kesejahteraan sosial jangka panjang dan berkelanjutan dan tindakan luar biasa atau luar biasa.²⁹

Polandia merupakan negara yang secara moral harus ikut dalam melaksanakan tanggungjawab dalam pernyataan umum mengenai *Universal Declaration of Human Rights*. Berdasarkan hukum pengungsi internasional ataupun Haryomataram, maka Polandia seharusnya mengikuti beberapa aspek penting seperti memenuhi kebutuhan dasar (makanan, air bersih, tempat tinggal yang nyaman, layanan kesehatan, dan pendidikan), perlindungan hukum (hak untuk melindungi para pengungsi dari kekerasan, penganiayaan, dan diskriminasi), kerjasama internasional, dan pemberdayaan yang berfungsi untuk memungkinkan para pengungsi mempunyai tindakan atas hidup mereka sendiri.

Humanitarian Refugees berkaitan erat dengan solidaritas, dikarenakan pengungsi yang meninggalkan tempat tinggal mereka akibat merasa tidak aman terhadap konflik bersenjata yang ada di dalam negaranya sangat membutuhkan pertolongan dan kemurahan hati dari pemerintah atau masyarakat tuan rumah. Pemerintah atau masyarakat tuan rumah berupaya dan bekerjasama untuk memberikan bantuan dukungan kepada para pengungsi yang membutuhkan pertolongan. Solidaritas yang diberikan oleh pemerintah atau masyarakat tuan rumah dalam memberikan dukungan dapat membantu para pengungsi membangun kembali semangat hidup mereka.³⁰

²⁹ Ibid hal 8.

³⁰ De, A., & Misra, M. (2023). From Bastuhara to Immigrati: Resistance and Refugee Solidarity in Amitav Ghosh's *The Hungry Tide* and *Gun Island*. *The Outlook: Journal of English Studies*, 14, 71-82.

Tindakan Polandia dalam menerima dan menyediakan perlindungan kepada pengungsi Ukraina menunjukkan solidaritas mereka yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan serta hukum konvensi internasional yang melindungi hak-hak para pengungsi. Solidaritas dimulai ketika pemerintah atau masyarakat tuan rumah mengakui atas penderitaan yang para pengungsi alami dan kebutuhan yang mendesak akan dukungan dan perlindungan. Ribuan sukarelawan Polandia yang menyambut banyaknya pengungsi Ukraina yang telah melarikan diri ke Polandia merupakan salah satu solidaritas yang mereka berikan. Bukan hanya itu pemerintah juga membentuk dana bantuan untuk mengintegrasikan pengungsi Ukraina ke Polandia. *Humanitarian Refugees* dengan solidaritas mempunyai keterhubungan satu sama lain, penderitaan para pengungsi merupakan keprihatinan bersama yang memerlukan tindakan bersama. Dengan mengakui rasa kemanusiaan, bersama-sama pemerintah dan masyarakat mengambil Langkah yang nyata untuk memberikan dukungan yang mereka butuhkan.³¹

Dengan demikian *Humanitarian Refugees* dapat digunakan untuk memperlihatkan upaya Polandia sebagai pemberian bantuan kemanusiaan kepada warga negara Ukraina karena terkena dampak perang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan upaya Polandia dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi

³¹ Ibid hal 26.

Ukraina tahun 2022. Menurut Miles dan Huberman, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa secara sistematis dan faktual. Ini melibatkan pengumpulan data yang mendetail serta analisis data secara mendalam untuk memahami fenomena dalam konteksnya.³²

1.6.2 Metode Analisis Data

Dengan mengadopsi metode analisis data kualitatif sebagaimana diuraikan oleh Miles dan Huberman, penelitian ini menggunakan cara yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan informasi yang terkumpul. Dengan demikian, penulis berupaya mengumpulkan berbagai informasi relevan yang mengandung data kualitatif dari artikel-artikel ilmiah, website resmi, berita, laporan, guna mendukung analisis dan konsep teoritis dalam riset.³³

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka atau *library research*, yang melibatkan pengumpulan bahan referensi seperti buku, jurnal, working paper, dan artikel-artikel yang diakses melalui internet untuk memastikan validitas hasil penelitian. Metode berbasis internet ini dioptimalkan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik yang diteliti. Data tersebut dibantu dengan menggunakan mesin pencarian *Publish or Perish*, *Google Scholar*, *Mendeley*, dan *Sci.hub*.

³² Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.

³³ Ibid

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Dengan tujuan pembahasan pada penelitian ini tidak meluas terlalu jauh dan hanya berfokus pada tujuan awal peneliti, maka penelitian ini hanya akan melihat bagaimana upaya Polandia dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Ukraina tahun 2022.

1.6.4.2 Batasan Waktu

Peneliti akan menetapkan batasan pada penelitian ini, supaya pembahasannya tidak meluas terlalu jauh dengan terfokus pada tahun 2022-2024. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut tepatnya 24 Februari 2022, Invasi pasukan militer Rusia ke Ukraina mengakibatkan ribuan warga Ukraina mulai melakukan perjalanan ke Polandia untuk mencari perlindungan dan dukungan. Invasi pasukan militer Rusia ke Ukraina mengakibatkan ribuan warga Ukraina mulai melakukan perjalanan ke Polandia untuk mencari perlindungan dan dukungan. Sedangkan krisis masih berlanjut sampai tahun 2024 meskipun jumlah pengungsi tidak meledak seperti pertama kali invasi.

1.7 Argumen Pokok

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa pemerintahan Polandia dalam merespon krisis pengungsi Ukraina akibat invasi Rusia pada tanggal 24 Februari 2022 adalah dengan memberikan beberapa upaya yaitu menerima para pengungsi dan memberikan perlindungan terhadap mereka. Dalam menerima para pengungsi, pemerintah Polandia membuka

membuka jalur perbatasan dan penyediaan wilayah transit, serta pembuatan aturan hukum yang menjamin keamanan dan keselamatan para pengungsi. Aturan tersebut berupa undang-undang bantuan yang bukan hanya diberikan legalisasi tempat tinggal, prosedurnya disederhanakan untuk memberikan hak yang sama seperti yang didapatkan oleh masyarakat Polandia. Sedangkan dalam menyediakan perlindungan untuk para pengungsi, pemerintah Polandia memberikan akses layanan kesehatan dan psikososial, mendapatkan Pendidikan, memberikan akomodasi tempat tinggal, dan memberikan bantuan ekonomi berupa donasi atau bahkan pembukaan lapangan pekerjaan.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I	<p>PENDAHULUAN</p> <p>1.1 Latar Belakang</p> <p>1.2 Rumusan Masalah</p> <p>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</p> <p>1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p>1.3.2 Manfaat Penelitian</p> <p>1.3.2.1 Manfaat Akademis</p> <p>1.3.2.2 Manfaat Praktis</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Landasan Konseptual</p> <p>1.5.1 Konsep Kebijakan Publik</p> <p>1.5.2 <i>Refugees Humanitarian</i></p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p>1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p>1.6.2 Metode Analisis</p> <p>1.6.3 Teknik Pengumpulan Data</p> <p>1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>1.6.4.1 Batasan Materi</p> <p>1.6.4.2 Batasan Waktu</p> <p>1.7 Argumen Pokok</p> <p>1.8 Sistematika Penulisan</p>
--------------	---

<p style="text-align: center;">BAB II POLANDIA DAN PENGUNGSU UKRAINA</p>	<p>2.1 Respon Umum Uni Eropa dan Polandia Terhadap Pengungsi Ukraina</p> <p>2.2 Data Pengungsi Ukraina</p> <p>2.2.1 Data Pengungsi Ukraina di Polandia</p> <p>2.2.2 Data pengungsi Ukraina di Negara Tetangga</p> <p>2.2.3 Data Pengungsi Ukraina di Uni Eropa</p> <p>2.3 Penyebab Kedatangan Pengungsi Ukraina di Polandia</p> <p>2.4 Rute Migrasi Pengungsi Ukraina Menuju Polandia dan Negara-Negara Tetangganya</p> <p>2.5 Dampak Pengungsi Ukraina Terhadap Polandia</p> <p>2.5.1 Dampak Pengungsi Ukraina Terhadap Politik Polandia</p> <p>2.5.2 Dampak Pengungsi Ukraina Terhadap Kondisi Sosial Polandia</p> <p>2.5.3 Dampak Pengungsi Ukraina Terhadap Perekonomian Polandia</p> <p>2.6 Aturan dan Prosedur Penerimaan Pengungsi di Polandia</p>
<p style="text-align: center;">BAB III UPAYA POLANDIA DALAM MENERIMA PENGUNGSU UKRAINA</p>	<p>3.1 Pembukaan Jalur Perbatasan dan Penyediaan Wilayah Transit Untuk Pengungsi Ukraina</p> <p>3.2 Pembuatan Aturan Penerimaan Pengungsi</p> <p>3.2.1 Keputusan Pelaksana Dewan 2022/382</p> <p>3.2.2 Undang-undang bantuan (<i>Act on Assistance to Ukrainian Citizens</i>)</p> <p>3.2.3 <i>Polish National Identification Number</i> (PESEL)</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV UPAYA POLANDIA DALAM MENYEDIAKAN PERLINDUNGAN PENGUNGSU UKRAINA</p>	<p>4.1 Menyediakan Akses Kesehatan Kepada Pengungsi Ukraina</p> <p>4.1.1 Menyediakan Vaksinasi Bagi Pengungsi Ukraina</p> <p>4.1.2 Menyediakan Layanan Kesehatan Mental Bagi Pengungsi Ukraina</p> <p>4.1.3 Menyediakan Perawatan Paliatif Bagi Pengungsi Ukraina</p> <p>4.2 Menyediakan Pasar Ketenagakerjaan Bagi Pengungsi Ukraina</p> <p>4.3 Menyediakan Akses Untuk Mendapatkan Pendidikan</p> <p>4.4 Menyediakan Akomodasi dan Pemukiman Pengungsi</p>

**BAB V
PENUTUP**

**5.1 Kesimpulan
5.2 Saran**

